

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz, S. W. (1984). *Aspek-Aspek Hukum KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penulisan Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadhikusuma, S. R. (2002). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, M. P. (2014). *Penulisan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2011). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- _____, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus, M. H. (1998). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2005). *Metode Penulisan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ruslan, R. (2004). *Metode Penulisan: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Saifudin. (2009). *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Singarimbun, M., Effendi, S., Ancok, D., Hagul, P., Manning, C., Singarimbun, I., . . . Effendi, T. N. (1987). *Metode Penulisan Survei*. Yogyakarta: LP3 ES.
- Soebechi, I. (2016). *Hak Uji Materil*. Solo: Sinar Grafika.
- W, P. A. (2007). *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Widyanti, N., & Sunindhia, Y. (2003). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, PT Bina Aksara.

Penulisan Hukum

- Herawati, V. (2015). *Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Produk Impor Tepung Gandum yang Mengalami Lonjakan Impor*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hernanda, N. (2011). *Analisis Peramalan Tingkat Produksi dan Konsumsi Gula Indonesia Dalam Mencapai Swasembada Gula Nasional*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Marta, Y. D. (2018). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Donor Mata di Bank Mata Cabang Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nurlatifah, I. (2018). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi PT Bumi Asih Jaya (Studi Kasus: Putusan Nomor 408K/PDT.SUS-Pailit/2015)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Widowati, R. (2017). *Implikasi Berlakunya ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Pada Kebijakan Impor Gula Terhadap Petani Tebu di Provinsi Jawa Timur*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Adhiem, M. A. (2018). *Kebijakan Impor Gula: Potensi Dampak dan Upaya Pengamanan Stok Nasional*. Info Singkat, 19-24.
- Fajrin, A. E., Hartono, S., & Waluyati, L. R. (2015). *Permintaan Gula Rafinasi Pada Industri Makanan Minuman dan Farmasi di Indonesia*. Agro Ekonomi, 24-30.
- Farriyanti, A. (2007). *Dampak Kebijakan Tarif Impor Gula Terhadap Kesejahteraan Produsen dan Konsumen*. Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian, 13-23.
- Hattu, H. (2011). *Tahapan Undang-Undang Responsif*. Mimbar Hukum, 406-419.
- Supriyati. (2011). *Kaji Ulang Konsep Neraca Gula Nasional: Konsep Badan Ketahanan Pangan Vs Dewan Gula Indonesia*. Analisis Kebijakan Pertanian, 109-124.
- Zain, M. A. (2015). *Politik Hukum Koperasi di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian di Indonesia)*. Jurnal Penulisan Hukum, 161-177.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengesahan *ASEAN Trade In Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang Asean) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2].

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 60 Seri E.).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar Di Pasar.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 527/MPP/KEP/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 117/m-dag/per/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2000, 2015).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.